

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan beberapa kajian dasar yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu: nilai-nilai pendidikan anti korupsi, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pembentukan karakter, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

A. Inseri

1. Pengertian Inseri

Inseri, yang berasal dari kata bahasa Inggris "Insertion" dan berarti penyisipan, adalah strategi penting dalam memperkuat nilai karakter. Pemerintah telah mengambil langkah bijak dengan menerapkan inseri untuk menyisipkan nilai-nilai karakter ke dalam setiap mata pelajaran di sekolah dan madrasah. Inseri ini merupakan metode inovatif yang menyajikan materi pelajaran dengan cara menanamkan inti sari nilai-nilai antikorupsi dalam pelajaran PPKn, menjadikannya lebih relevan dan bermakna bagi siswa (Solong & Gorontalo, 2023).

2. Kurikulum

Kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah. Berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah mulai dari dibukanya pintu sekolah sampai dengan lonceng pulang. Demikian juga dengan siswa yang mulai masuk sekolah, mereka melakukan kegiatan belajar berdasarkan kurikulum yang berlaku dan selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Andhika Wirabhakti, 2020).

Manajemen Kurikulum terkait dengan pendidikan anti dilakukan dengan cara:

- a. Modifikasi isi/materi.
- b. Modifikasi proses belajar mengajar.
- c. Modifikasi lingkungan belajar.
- d. Modifikasi pengelolaan kelas.

3. Model Inseri

Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipilih yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Menurut Elwina dan Riyanto (dalam Andhika Wirabhakti, 2020) model-model tersebut antara lain:

- a. Model sebagai mata pelajaran tersendiri

Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur.

- b. Model terintegrasi dalam semua mata pelajaran

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa

pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

c. Model diluar pembelajaran

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

d. Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Berdasarkan pembiasaan itulah anak terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

B. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi

1. Pengertian pendidikan anti korupsi

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan upaya pencegahan korupsi. Pendidikan itu sendiri mencakup pembentukan tata nilai baik pada tingkat individu maupun kelompok melalui proses pembelajaran, latihan, pengembangan proses belajar, dan berbagai metode pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan moralitas, kecerdasan, dan kesehatan siswa, sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup dan berintegrasi dengan alam serta masyarakat (Toni Nasution, 2017).

Dari perspektif yang lain, korupsi mengacu pada perilaku yang tidak jujur atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dengan menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi merupakan usaha yang disengaja untuk memberikan pemahaman dan mencegah korupsi melalui tiga jenis pendidikan yang berbeda: pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal di tengah masyarakat (Rizki, 2023).

Menurut Wibowo (2013:38), pendidikan anti-korupsi adalah sebuah inisiatif yang sengaja dirancang dan direncanakan untuk membentuk proses pembelajaran yang kritis terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi. Lebih dari sekadar menjadi sarana transfer pengetahuan, pendidikan anti-korupsi juga memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan karakter dan penerapan prinsip-prinsip anti-korupsi. Tambahan pula, pendidikan anti-korupsi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam memahami berbagai masalah dan tantangan yang terkait dengan isu-isu nasional, yang sering kali menjadi pemicu

korupsi. Melalui pendidikan anti-korupsi ini, diharapkan dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap dampak yang dihasilkan oleh korupsi.

Menurut Sumanti, pendidikan anti-korupsi merupakan langkah strategis dalam mengendalikan dan mengurangi tingkat korupsi dengan menggunakan berbagai upaya yang bertujuan untuk mendorong generasi penerus agar memiliki sikap yang teguh dalam menolak segala bentuk praktik korupsi. Membangun mentalitas anti-korupsi ini memerlukan kesadaran kita dalam membimbing generasi penerus untuk dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem nilai yang mereka anut, serta menggantinya dengan nilai-nilai yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep "memberantas korupsi sampai ke akarnya" dalam konteks pendidikan merujuk pada rangkaian upaya untuk melahirkan generasi yang tidak hanya menolak, tetapi juga tidak akan mentoleransi tindakan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam proses pendidikan bagi generasi Indonesia. Selanjutnya, sebelum menerapkan pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan, pembangunan karakter harus didorong terlebih dahulu. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat karakter generasi muda sebelum mereka terlibat secara aktif dalam pelayanan kepada masyarakat (H. Nur Solikin, 2014:140).

Pendidikan antikorupsi adalah inisiatif yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman dan mencegah kegiatan korupsi melalui berbagai metode pendidikan, termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, lingkungan keluarga secara informal, dan melalui pendidikan non-formal di masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendidikan anti-korupsi tidak hanya membatasi diri pada pemahaman terhadap nilai-nilai anti-korupsi semata, tetapi juga melibatkan

internalisasi dan implementasi nilai-nilai tersebut sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Syarbini Amirullah, 2014).

2. Nilai pendidikan anti korupsi

Dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dijelaskan bahwa proses penetapan nilai dan perilaku anti-korupsi dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan keberadaan nilai-nilai dan perilaku tersebut yang akan disertakan dalam kurikulum pembelajaran mata pelajaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai arah dan tujuan integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan.

Menurut Ki Supriyoki, penerapan pendidikan anti-korupsi dalam proses pembentukan karakter dapat memiliki dampak yang sangat signifikan bagi individu (peserta didik) maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terjadi ketika pendidikan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai yang bersifat ideal dan normatif, tetapi juga melibatkan aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang dapat diukur. Keberadaan aspek-aspek yang dapat diukur ini mempermudah pengawasan dan pengendalian implementasi nilai-nilai tersebut, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh pihak lain.

aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang dapat diukur yang dimasukkan dalam pendidikan anti korupsi oleh Tim Pengembangan Pendidikan Budi Pekerti (TPPBP):

- a. Pengabdian
- b. Kejujuran
- c. Sopan santu
- d. Toleransi

- e. Kedisiplinan
- f. Keikhlasan
- g. Tega selira
- h. Empang papa
- i. Guyub rukun
- j. Gotong royong
- k. Tatak rama

Nilai-nilai tersebut diajarkan kepada murid dengan harapan agar mereka dapat mengimplementasikannya secara langsung dalam interaksi sosial mereka. Secara substansial, nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan anti-korupsi juga memiliki dasar pada prinsip-prinsip pendidikan karakter. Dalam menyusun nilai-nilai pendidikan anti-korupsi, prinsip-prinsip ini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter murid menjadi lebih baik, seperti integritas, empati, kerja keras, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kerjasama, keberanian, dan ketekunan (H. Nur Solikin:150-152).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan sembilan prinsip Integritas yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku korupsi. Prinsip-prinsip anti-korupsi ini mencakup integritas, otonomi, ketaatan, akuntabilitas, dedikasi, sederhana, ketegasan, dan keadilan. Implementasi prinsip-prinsip anti-korupsi ini dianggap sebagai hal yang esensial bagi setiap individu dalam mengatasi berbagai faktor eksternal yang mungkin memicu praktik korupsi.

Nilai-nilai integritas dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu

- a. Nilai inti

Nilai inti meliputi: Nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab.

b. Nilai sikap

Nilai sikap meliputi: nilai adil, berani, dan peduli.

c. Nilai etos kerja

Nilai etos kerja meliputi: nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana.

Lestyowati dalam (H. Nur Solikin, 2022:294) Menguraikan tentang nilai-nilai integritas

a. Jujur

Jujur adalah sifat dan perilaku yang mencerminkan keselarasan antara pengetahuan, ucapan, dan tindakan seseorang. Jujur berarti memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebenaran. Seseorang yang jujur adalah individu yang dapat diandalkan, teguh pada nilai-nilai, tidak menyebarkan kebohongan, dan tidak melakukan tindakan yang tidak jujur.

b. Disiplin

Jujur adalah sifat dan perilaku yang mencerminkan keselarasan antara pengetahuan, ucapan, dan tindakan seseorang. Jujur berarti memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebenaran. Seseorang yang jujur adalah individu yang dapat diandalkan, teguh pada nilai-nilai, tidak menyebarkan kebohongan, dan tidak melakukan tindakan yang tidak jujur.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah perilaku dan sikap yang dipresentasikan oleh individu dalam melaksanakan kewajiban dan tugas, baik yang menyangkut diri pribadi, aspek sosial, nasional, kepentingan negara, maupun aspek keagamaan.

d. Adil

Adil merujuk pada sikap yang tidak memihak kepada pihak manapun dan tidak menunjukkan keberpihakan pada satu pihak tertentu. Adil berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua individu tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.

e. Berani

Berani adalah keberanian yang menandakan keberanian hati, keyakinan diri yang kuat dalam menghadapi ancaman atau situasi yang dianggap berbahaya dan sulit. Berani berarti tidak merasa takut atau cemas.

f. Kepedulian

Kepedulian merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan perhatian dan perhatian terhadap individu lain, masyarakat yang memerlukan bantuan, dan juga lingkungan sekitar.

g. Kerja keras

Kerja keras adalah dedikasi yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, atau pekerjaan dengan sebaik mungkin. Ini mencakup ketekunan, keberanian, dan kegigihan untuk terus berusaha meskipun menghadapi rintangan. Kerja keras ditopang oleh kemauan yang kuat, yang membawa aspek-aspek seperti keteladanan, ketekunan, daya tahan, produktivitas, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan semangat pantang menyerah

h. Mandiri

Mandiri merujuk pada kemampuan untuk mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat menyelesaikan serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Kapasitas ini dianggap vital dan mendasar bagi seorang pemimpin,

karena mandiri memungkinkan mereka memimpin dengan efektif. Kemandirian membentuk karakter yang tangguh pada seseorang, sehingga mereka tidak overly rely pada bantuan dari pihak lain.

i. Sederhana

Sederhana merujuk pada kehidupan yang bersahaja, yang ditandai dengan penggunaan barang-barang atau sumber daya dengan penuh pertimbangan dan tanpa pemborosan. Individu yang memiliki tingkat integritas yang tinggi adalah mereka yang memahami kebutuhan mereka dan berupaya memenuhinya dengan bijaksana, tanpa menciptakan kemewahan yang berlebihan. Gaya hidup yang sederhana mengajarkan individu untuk hidup sesuai dengan kemampuan finansialnya. Lebih dari itu, gaya hidup yang sederhana juga mengajarkan individu untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, serta untuk menolak godaan akan kemewahan yang berlebihan.

3. Penyebab dan Dampak korupsi

a. Penyebab korupsi

Robert Klitgaard mengeksplorasi akar munculnya korupsi dengan cara yang memikat: melalui persamaan sederhana $C = M + D - A$. Dalam konteks ini, korupsi disebabkan oleh dominasi kekuasaan (M) yang ditambah dengan kewenangan (D), namun terkikis oleh akuntabilitas (A). Sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang publik, korupsi berkembang subur di tengah kurangnya pengawasan terhadap kekuasaan dan peluang untuk mengeksploitasi kekuasaan tersebut (H. Nur Solikin, 2014:30).

Korupsi adalah kompleks dan memiliki banyak akar penyebabnya. Syed Hussain Alatas menyajikan sepuluh faktor yang beragam yang menjadi pemicu

korupsi. Pertama, adalah kehadiran atau kelemahan pemimpin kunci yang memberikan contoh buruk dalam perilaku koruptif. Kedua, adalah kekurangan dalam pendidikan dan moralitas. Ketiga, kolonialisme memainkan peran dalam memengaruhi struktur sosial. Keempat, pendidikan yang kurang memadai dapat meningkatkan risiko korupsi. Kelima, kemiskinan sering kali menjadi tanah subur bagi perilaku koruptif. Keenam, ketidakadilan dalam sistem hukum dapat merangsang perilaku korupsi. Ketujuh, kurangnya lingkungan yang mendukung integritas dan lemahnya struktur pemerintahan dapat menjadi faktor pendukung korupsi. Kedelapan, perubahan yang drastis dalam struktur sosial juga dapat memperburuk masalah korupsi. Kesembilan, kondisi sosial yang tidak stabil dapat memperkuat kecenderungan koruptif (H. Nur Solikin, 2014:31).

Menurut penelitian oleh Ilaham Gunawan dan Theodore M. Smith (dalam Moh. Yamin, 2016:46-58), teridentifikasi enam faktor yang menjadi penyebab korupsi, yakni:

1) Faktor Politik

Faktor ini secara erat terhubung dengan niat dan integritas politik dari pemerintahan yang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk memerangi korupsi. Ini menunjukkan bahwa tindakan politik yang tidak bermoral dapat menggoyahkan fondasi stabilitas suatu negara. Politik yang terjerumus dalam perilaku yang tidak bermartabat, yang mengabaikan prinsip-prinsip kejujuran, menciptakan lingkungan politik yang beracun dan merusak kondisi yang kondusif untuk kemajuan.

2) Faktor yuridis

Ketidakmampuan yang kuat dalam penegakan hukum dan kekurangan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum, bersamaan dengan kurangnya komitmen dan integritas aparat penegak hukum, secara jelas menghambat upaya pemberantasan korupsi. Pada intinya, kelemahan dalam penerapan supremasi hukum menciptakan tantangan yang signifikan dalam melawan korupsi. Ketika supremasi hukum tidak diprioritaskan, gerakan anti-korupsi akan terhambat secara signifikan. Namun, dengan penerapan supremasi hukum yang kokoh, upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif dan korupsi akan sulit berkembang.

3) Faktor Budaya

Masih terdapat perkembangan budaya feodal dan dorongan untuk gaya hidup yang mewah yang terus berlangsung. Ini mencerminkan kondisi para pejabat di negara ini. Seharusnya, menjadi pejabat berarti bertanggung jawab untuk melayani rakyat, tetapi mereka justru mengharapkan pelayanan dan penghormatan yang berlebihan. Seharusnya, kepemimpinan berkaitan dengan pelayanan kepada rakyat, namun mereka malah mengubah peran mereka menjadi penguasa yang angkuh. Seharusnya, mereka diharapkan bertindak untuk kebaikan rakyat, namun sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat sehingga tindakan mereka menyebabkan penderitaan bagi warga negara.

4) Faktor struktur administrasi pemerintah

Ketiadaan pengawasan yang ketat membuka pintu lebar bagi korupsi. Penggunaan metode administrasi pemerintahan yang ketinggalan zaman

adalah salah satu faktor yang memfasilitasi tindakan korupsi. Saat administrasi tidak terikat pada standar yang tegas, korupsi pun dapat berkembang. Ditambah lagi, kurangnya pengawasan yang konsisten dan ketat dalam administrasi semakin meningkatkan risiko korupsi.

5) Faktor insentif ekonomi yang tidak berkembang

Ketidakpuasan terhadap insentif yang minim dalam pekerjaan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan, di mana upaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan imbalan yang diperoleh. Umumnya, tingkat insentif berkaitan erat dengan beban kerja yang harus dipikul. Namun, ketidakseimbangan antara penghasilan dan beban kerja sering kali mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini membuka peluang luas bagi praktik korupsi.

6) Faktor historis

Dampak berat dari masa kolonialisme, termasuk adopsi budaya korup dan preferensi terhadap kepentingan elit dalam sistem pemerintahan, telah bertahan sepanjang periode sejarah mulai dari masa Orde Baru hingga masa pasca-reformasi. Akar sejarah yang masih terkait erat dengan warisan kolonialisme serta pola pikir yang mendukung perilaku koruptif terus berlanjut hingga saat ini. Ketika paradigma ini tertanam dalam benak para pemimpin masa kini, risiko perilaku yang menyerupai pendahulu mereka kembali muncul, meski dalam wujud yang berbeda. Prinsipnya, ini adalah pondasi bagi korupsi yang terus bermutasi.

Masih ada perkembangan budaya feodal dan dorongan untuk gaya hidup mewah yang terus berlangsung, yang mencerminkan perilaku para

pejabat di negara ini. Seharusnya, menjadi pejabat berarti memiliki tanggung jawab untuk melayani rakyat, tetapi sayangnya mereka cenderung mengharapkan pelayanan dan penghormatan yang berlebihan. Seharusnya, kepemimpinan berkaitan erat dengan pelayanan kepada rakyat, namun seringkali mereka mengubah peran mereka menjadi penguasa yang sombong. Seharusnya, diharapkan bahwa mereka bertindak demi kebaikan rakyat, namun sering kali mereka mengabaikan kebutuhan masyarakat sehingga tindakan mereka menimbulkan penderitaan bagi warga negara.

b. Dampak korupsi

Menurut Nugraheni, terdapat enam dampak negatif dari korupsi, yaitu:

- 1) Ketidakadilan
- 2) inefisiensi
- 3) jenis kejahatan lain
- 4) Semangat administrasi dan kehilangan
- 5) Kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik menurun.
- 6) Tarif layanan dinaikkan (Helmi, 2014).

Seharusnya korupsi digolongkan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa karena dampak negatif yang dihasilkannya. Tindakan yang merugikan hak milik dan melanggar hukum merupakan salah satu bentuk dari korupsi.

Dampak korupsi yang dikemukakan oleh (Mukodi & Afid Burhanuddin, 2014:57-76).

a. Bidang ekonomi

- 1) Penurunan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian dalam investasi merupakan konsekuensi dari korupsi. Negara-negara yang terlibat dalam korupsi sering kali membuat investor multinasional enggan untuk melakukan investasi karena tingginya risiko terkait biaya ilegal.
- 2) Penurunan produktivitas kerja terjadi sebagai akibat dari menurunnya iklim investasi, yang berdampak pada penurunan produksi di sektor industri. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meningkat.
- 3) Meningkatkan biaya produksi akan berdampak pada peningkatan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Kelambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian dalam investasi adalah akibat dari korupsi. Negara-negara yang terkena dampak korupsi seringkali membuat investor internasional ragu untuk berinvestasi karena risiko biaya yang tidak terduga.
- 5) Penurunan produktivitas kerja disebabkan oleh turunnya minat investor, yang mengakibatkan penurunan produksi di sektor industri. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 6) Kenaikan biaya produksi akan berdampak langsung pada meningkatnya beban finansial yang harus ditanggung oleh konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.
- 7) Penurunan kualitas barang dan jasa bagi konsumen

b. Bidang sosial kemasyarakatan

- 1) Menaikkan standar layanan dan kualitas jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Program penanggulangan kemiskinan terhambat oleh langkah-langkah yang lamban dan kurang efektif.
- 3) Akses terhadap layanan penting terbatas bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.
- 4) Lonjakan kasus kriminalitas mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Solidaritas sosial menurun, meninggalkan celah untuk pertikaian dan konflik di antara anggota masyarakat.
- 6) Meningkatnya kehampaan moral di kalangan masyarakat, merongrong fondasi nilai-nilai yang telah lama dijunjung.
- 7) Angka kemiskinan meroket, meninggalkan sebagian besar masyarakat terpinggirkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 8) Keyakinan masyarakat terhadap integritas pemerintah, legislatif, dan sistem peradilan mengalami penurunan, menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian di dalam masyarakat.

c. Bidang politik

- 1) Melorotnya moralitas sosial dan politik: Serangan fajar yang dibalut dengan politik uang menjelang pemilihan umum menjadi bukti nyata bahwa etika politik sudah membusuk.
- 2) Lemahnya efektivitas peraturan hukum yang ada.
- 3) Efisiensi pelayanan publik oleh birokrasi mengalami kemunduran.

- 4) Lonjakan angka golput dalam proses pemilihan umum.
 - 5) Goyahnya kepercayaan masyarakat terhadap fondasi demokrasi.
 - 6) Intervensi semakin kuat dari pemodal dalam lanskap politik
- d. Bidang hukum dan hak asasi manusia
- 1) Lembaga penegak hukum merosot dalam kewibawaannya.
 - 2) Gelombang hukuman yang ringan bagi pelaku korupsi semakin melonjak. Praktik suap di belakang layar peradilan menghasilkan vonis yang mengecewakan terhadap kasus korupsi.
 - 3) Gejala kerusuhan merambah ke dalam lembaga masyarakat.
 - 4) Kesadaran akan hak asasi manusia melorot.
- e. Bidang kesehatan
- 1) Keterbatasan aksesibilitas dalam proses administrasi asuransi kesehatan masyarakat.
 - 2) Penurunan tingkat layanan kesehatan bagi lapisan masyarakat ekonomi bawah.
 - 3) Rumah sakit sering menolak pasien miskin dengan alasan tidak tersedianya ruang kosong. Kendala kuota jam keseluruhan yang terbatas, ditambah dengan sasaran yang tidak tepat, membuat program ini kurang efektif.
- f. Bidang pendidikan
- 1) Kendala-kendala terkait dengan kurangnya fasilitas dan infrastruktur sekolah serta pelaksanaan anggaran pendidikan yang rendah mutunya menjadi isu yang signifikan. Dampaknya, fasilitas dan infrastruktur sekolah menjadi terbatas karena alokasi anggarannya tergerus oleh

praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Beberapa pendidik kehilangan fokus pada proses pembelajaran siswa mereka. Mereka lebih tertarik untuk mencari penghasilan tambahan di luar lingkungan sekolah, yang mengakibatkan penggunaan waktu yang tidak efisien. Akibatnya, siswa tidak menerima pengajaran yang optimal karena tidak ada guru yang memberikan pelajaran pada waktu tersebut.

3) Pemotongan gaji sertifikasi guru diharapkan pemerintah dapat mendorong pendidik untuk mengembangkan pengetahuannya. Namun, beberapa pendidik malah memilih untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli mobil atau perangkat teknologi modern daripada untuk membeli buku atau sumber belajar lainnya. Hal ini memicu kecemburuan dari pihak lain yang berjuang pada pemotongan gaji sertifikasi

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa korupsi bukanlah suatu permasalahan yang sederhana yang hanya mempengaruhi sektor tertentu dalam kehidupan, tetapi memiliki dampak yang merusak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Setiap gangguan yang disebabkan oleh korupsi di suatu sektor juga menimbulkan efek negatif yang merembet ke berbagai bidang kehidupan lainnya.

4. Tujuan pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi membentuk landasan kokoh bagi pembentukan mental dan karakter yang teguh dalam menegakkan kebenaran. Ini tidak hanya

melindungi individu dari dampak merugikan korupsi, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menentang secara tegas pelanggaran moral (Moh. Yamin, 2016:58). Menurut Sari, (2023) menambahkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah mendorong pertumbuhan nilai-nilai dan kemampuan yang kuat untuk melawan korupsi dengan sikap proaktif.

Menurut Harmanto, tujuan pendidikan anti korupsi yang diungkapkan dalam Simposium Nasional Pendidikan tahun 2008 adalah:

- a. Sebagai pondasi pengetahuan yang krusial tentang korupsi bagi kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa, guna menghindarkan mereka dari jebakan korupsi di masa depan.
- b. Sebagai langkah awal dalam meredam budaya korupsi dan menanamkan sikap mental yang anti korupsi di lingkungan sekolah.
- c. Sebagai wahana pengalaman yang menyatu antara pendidikan agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang membentuk dasar kehidupan di sekolah dan masyarakat.
- d. Sebagai upaya mendidik generasi berikutnya dengan karakter yang jujur, bertanggung jawab, berbicara dengan hati-hati, dan bertindak dengan integritas (Moh. Yamin, 2016:58).

Kemudian Menurut Sjaruddin dalam (Handoyo, 2010:2) menyebutkan tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut :

- a. Agar saat memasuki masyarakat, siswa telah memperoleh pemahaman yang memadai tentang etika di setiap tingkatan sebagai "pemimpin sosial".
- b. Untuk memastikan bahwa siswa memahami secara menyeluruh pentingnya etika, baik di sekolah publik maupun di sektor privat.

- c. Untuk memastikan bahwa siswa mengenali dan memahami dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional.
- d. Agar siswa memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi dari pendidikan anti korupsi adalah membentuk landasan pemahaman yang kuat mengenai korupsi. Harapannya, hal ini akan menanamkan semangat anti korupsi secara dalam pada setiap individu, terutama para siswa. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kemampuan untuk menahan godaan korupsi dan mencegah diri sendiri serta orang lain dari terperangkap dalam jaringan praktik yang merugikan tersebut (Nia Andina, 2019).

C. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Mansoer menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan hasil dari pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan demokrasi, serta pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada filosofi Pancasila, dengan fokus pada identitas nasional dan semangat bela negara. Berdasarkan fondasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang berakar pada Pancasila dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengamati aspek kebangsaan dan kewarganegaraan, yang dihadapkan pada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai landasan analisis serta panduan (Rehaj, 2017).

Samsuri mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan strategi untuk menyiapkan generasi penerus bangsa agar menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang esensial untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Secara substansial, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang beretika dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara Pancasila (Samsuri, 2011).

Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan individu sebagai warga negara yang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan beretika, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Konstitusi UUD 1945 (Sudibyo, 2006)

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pengajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan mahasiswa mengenai pembentukan identitas kewarganegaraan. Pusat perhatiannya adalah untuk memastikan bahwa mereka memperoleh pemahaman yang kuat serta keterampilan untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan bermoral, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Mewujudkan kewarganegaraan yang kuat bagi individu atau penduduk suatu negara adalah tanggung jawab utama negara tersebut. Konsep warga negara yang cerdas dan baik sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan pandangan hidup negara bersangkutan.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai karakter kebangsaan; ia juga menjadi fondasi bagi identitas dan kesadaran warga negara dalam memahami hak serta kewajiban mereka. Dengan fokus pada kemampuan dasar kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan, tujuannya adalah membentuk identitas yang kuat bagi masyarakat. Peran penting pendidikan kewarganegaraan terletak pada pembentukan karakter generasi muda yang tidak hanya kritis terhadap isu-isu global, tetapi juga mampu menemukan solusi-solusi inovatif yang mendukung kemajuan.

Cakupan pendidikan kewarganegaraan yang termuat dalam (Permendiknas, 2006) cakupan materi pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melingkupi nilai-nilai yang mencerahkan: kehidupan yang harmonis dalam keberagaman, kasih sayang terhadap lingkungan, cinta akan kebangsaan, semangat Sumpah Pemuda, komitmen terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterlibatan dalam pertahanan negara, sikap yang memperkuat kepercayaan pada NKRI, dan semangat terbuka dalam menjaga keadilan bagi semua
- b. Garis panduan kehidupan, baik dalam bentuk norma, hukum, maupun peraturan, merangkum hal-hal menarik seperti: keteraturan dalam dinamika keluarga, disiplin di lingkungan sekolah, norma-norma yang mengatur kehidupan sosial, peraturan lokal, etika dalam bernegara, kerangka hukum nasional, dan dinamika peradilan di tingkat nasional maupun internasional.

- c. Bingkai Hak Asasi Manusia membawa berbagai aspek menarik, termasuk hak dan tanggung jawab anak-anak, peran serta anggota masyarakat, instrumen HAM di tingkat nasional dan internasional, serta upaya untuk mendorong, menghargai, dan melindungi hak asasi manusia.
- d. Dorongan warga negara mencakup elemen-elemen yang menarik: semangat gotong royong, penghargaan terhadap martabat sebagai bagian dari masyarakat, kebebasan untuk berkumpul, keberanian dalam menyuarakan pendapat, penghormatan terhadap keputusan bersama, pencapaian pribadi, serta jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara.
- e. Dokumen Konstitusi Negara mengandung narasi yang menarik: dari peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan konstitusi pertama, hingga perkembangan konstitusi-konstitusi yang telah memberikan pengaruh pada Indonesia, serta keterkaitan mendasar antara negara dan konstitusi.
- f. Dinamika Kekuasaan dan Politik memiliki cakupan yang luas, mencakup: struktur pemerintahan mulai dari tingkat dasar hingga kecamatan, otonomi daerah yang memperkuat pemerintahan lokal, peran pusat pemerintahan, perdebatan seputar demokrasi dan sistem politik, kebijaksanaan budaya politik, peralihan menuju budaya demokratis dalam pembentukan masyarakat yang madani, serta peran media dalam mendukung masyarakat yang demokratis.
- g. Pancasila merangkul esensi yang menarik: peranannya sebagai pondasi dan ideologi negara, perjalanan panjang pembentukannya, praktik nilai-

nilai Pancasila dalam rutinitas keseharian, serta karakter terbuka Pancasila sebagai sebuah ideologi.

- h. Dinamika Globalisasi membentang luas, merangkul: dampak globalisasi yang merambah berbagai sektor kehidupan, langkah-langkah kebijakan luar negeri Indonesia dalam era globalisasi, konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti arus globalisasi, jalinan keterkaitan antara negara-negara dan lembaga-lembaga internasional, serta evaluasi atas jejak-jejak yang ditinggalkan globalisasi.

2. Tujuan Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Membuat individu atau orang-orang menjadi warganegara yang terintegrasi dalam sebuah negara adalah salah satu tanggung jawab pokok pemerintah. Keberhasilan konsep warganegara yang bijaksana dan baik sangatlah tergantung pada filosofi dan sistem politik negara tersebut. Konsep ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembangunan.

Ubaedillah dan Abdul Rozak (2008) mengemukakan bahwa esensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah menghasilkan warga negara yang cerdas, bermoral, dan mampu memajukan bangsa serta memperkuat pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Sementara menurut Wahab A. A. dan Sapriya (2011), tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik sebagai warga negara yang baik.

Tujuan mata pelajaran pendidikan serta kewarganegaraan Menurut Depdiknas, (2003:48) yaitu memberikan kemampuan kepada siswa seperti:

- a. Melejit dalam kecerdasan dengan kemampuan analitis, logis, dan inovatif dalam merangkul gagasan kewarganegaraan.
- b. Berperan aktif, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi keadilan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
- c. Berkembang dengan arah yang jelas, menampilkan kepribadian yang kental dengan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.
- d. Mengoptimalkan perkembangan teknologi sebagai alat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat di belahan dunia lain.

Selain itu, Ubaedullah juga menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia sebagai berikut:

- a. Melatih keterampilan partisipasi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menghasilkan warga negara yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memegang teguh komitmen untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- c. Mendorong perkembangan budaya demokratis yang beradab, mencakup prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan tanggung jawab

D. Pembentukan karakter

1. Pengertian Pembentukan Karakter

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), pembentukan adalah proses, cara, atau tindakan membentuk. Dalam penggunaan istilahnya, pembentukan merujuk

pada usaha yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu, dengan maksud mengarahkan faktor-faktor bawaan menuju realisasi dalam kegiatan spiritual atau fisik.

Karakter adalah atribut, bawaan, moral, atau identitas seseorang yang terbentuk melalui internalisasi berbagai prinsip yang menjadi dasar pandangan hidup, pemikiran, perilaku, dan tindakan (Puskur, 2010:5). Ada beberapa strategi dalam upaya pembentukan karakter di lingkungan sekolah, seperti memperkenalkan dan mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak di lingkungan keluarga, serta memberikan panduan atau pemahaman tentang prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan dan dipahami dalam masyarakat. Karena itu, untuk mengembangkan karakter yang baik pada anak-anak, diperlukan usaha yang terencana dan komprehensif, yang dikenal sebagai pendidikan karakter.

Ada beberapa fase dalam proses pembentukan karakter yang mencakup pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan/pemantapan, pembudayaan, dan internalisasi nilai-nilai moral menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter yang memperkuat serta mendorong praktik moral dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjabaran mengenai fase-fase dalam proses pembentukan karakter (Supriwa, 2023:24-27).

a. Pengertian proses pembentukan karakter

Pembentukan karakter adalah proses mendalam yang bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang memberikan dampak positif pada anak-anak, membentuk karakter yang sejalan dengan norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini ditegakkan atas tiga landasan utama:

pendidikan di lingkungan sekolah, interaksi dengan masyarakat, dan pengaruh dari lingkungan keluarga.

Pendidikan karakter harus tercermin dalam setiap aspek pembelajaran, mulai dari metode pengajaran, isi kurikulum, hingga proses penilaian. Di sekolah, anak-anak diberi pengajaran tentang berbagai nilai yang berperan dalam membentuk karakter, seperti pendidikan agama, disiplin, toleransi, integritas, dan semangat nasionalisme. Semua usaha ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki karakter yang kokoh dan positif.

b. Proses pembentukan karakter

- 1) Pengenalan merupakan tahap awal dalam proses pembentukan karakter. Pada tahap ini, siswa diperkenalkan dengan konsep-konsep positif yang berasal dari lingkungan sekitar dan keluarga. Misalnya, anak-anak diajarkan tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan sebagainya.
- 2) Tahap berikutnya adalah pemahaman, di mana kita memberikan arahan atau penjelasan tentang nilai-nilai baik yang telah diperkenalkan kepada siswa.
- 3) Setelah siswa memahami nilai-nilai baik yang telah diajarkan, langkah selanjutnya adalah penerapan. Artinya, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai baik yang telah diajarkan.
- 4) Kemudian siswa memahami dan menerapkan perbuatan baik yang telah diajarkan, langkah selanjutnya adalah pengulangan atau pembiasaan. Ini

berarti kita secara berulang-ulang memperkuat atau membiasakan siswa untuk melakukan perbuatan baik tersebut.

- 5) Pembudayaan memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan pembentukan karakter yang baik, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga.
- 6) Internalisasi karakter siswa menjadi lebih kuat ketika didorong oleh suatu ideologi atau keyakinan. Ketika semua ini terjadi, akan muncul kesadaran dalam diri siswa untuk melakukan hal-hal baik tersebut.

E. Penelitian terdahulu

Temuan dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan menjadi landasan untuk melanjutkan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi untuk membantu dalam penelitian saat ini.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

NO	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Habib, dkk (2022) dengan judul Integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn di SMPN 8 Mataram telah dijalankan dengan baik menggunakan model korupsi dalam pembelajaran saintifik, pelaksanaan seperti Discovery Learning, PBL, dan PJBL. PPKn di SMP Negeri 8 Mataram	Model integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn di SMPN 8 Mataram telah dijalankan dengan baik menggunakan model korupsi dalam pembelajaran saintifik, seperti Discovery Learning, PBL, dan PJBL. Hal ini terbukti dari integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam semua	Persamaan penelitian ini dan terdahulu adalah pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui mata pelajaran PPKn dan metode penelitian	Penelitian terdahulu menggunakan discovery learning sedangkan penelitian ini tidak penelitian ini menyisipkan nilai-nilai pada saat proses

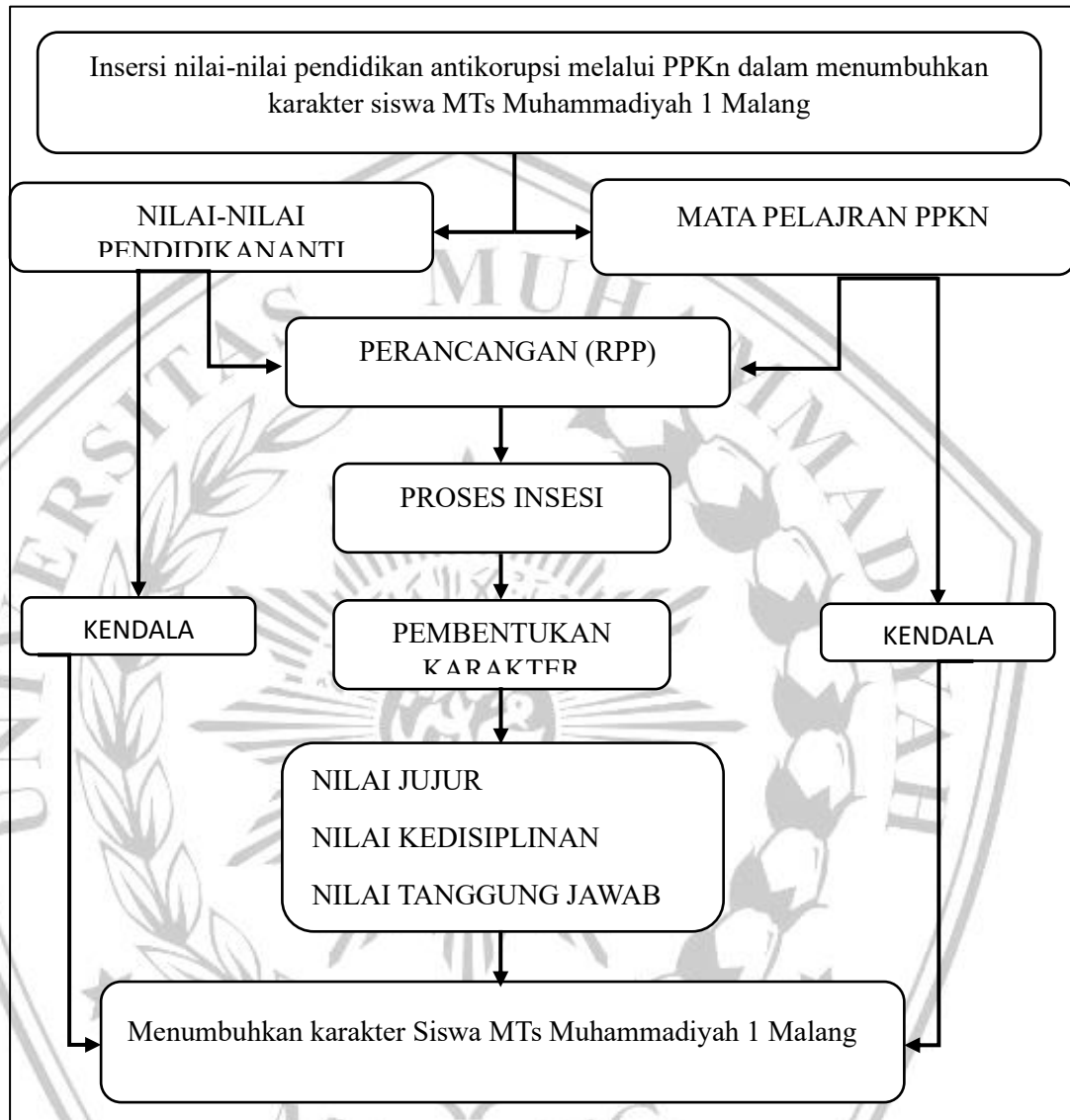
tahapan pembelajaran, menggunakan pebelajaran termasuk perencanaan, kualitatif berlangsung tanpa pelaksanaan, dan evaluasi sepengetahuan pembelajaran. Namun, siswa dan lokasi penerapan integrasi nilai-nilai anti-korupsi masih penelitian yang belum mencapai tingkat berbeda optimal karena hanya diterapkan pada tahapan pendahuluan dan penutup pembelajaran, belum merambah ke seluruh tahapan pembelajaran.

2. Hasil penelitian Setelah dilakukan Untuk persamaan penelitian yang dilakukan penyisipan nilai-nilai anti penelitian terdahulu oleh Natal korupsi, siswa dapat terdahulu dan saat berfokus kristiono dkk, mengenali risiko dari ini adalah pemahaman guru (2022) dengan tindakan pidana korupsi, mengintegrasikan terhadap nilai-judul memahami prinsip-prinsip nilai-nilai anti nilai anti korupsi Pengembangan pendidikan anti korupsi, dan mengalami perubahan yang akan di insersi dalam karakter mereka. siswa dan metode insersikan kepada pendidikan anti korupsi melalui Keberhasilan penyisipan penelitian yang siswa sedangkan mata pelajaran nilai-nilai anti korupsi sama yaitu penelitian saat ini PPKn dipengaruhi oleh berbagai metode kualitatif langsung faktor, termasuk berfokus, guru karakteristik individu sebagai motivator siswa, media dan materi dalam pembelajaran yang menerapkan nilai- digunakan, serta strategi nilai anti korupsi pengajaran yang sesuai. Namun, ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan penyisipan nilai-nilai anti

korupsi, seperti lingkungan sekolah dan kesalahan dalam pemilihan media dan strategi pembelajaran.

3. Hasil Penelitian Pengintegrasian nilai-nilai Untuk persamaan lokasi penelitian Yang Dilakukan anti-korupsi melalui penelitian Oleh Widiya pengembangan Hidden terdahulu dan saat Rahmawati Kurikulum ini adalah (2021) diimplementasikan melalui mengintegrasikan Dengan Judul beberapa aspek. Pertama, nilai-nilai anti korupsi kepada Inseri Nilai- peningkatan sikap positif siswa dan metode nilai anti seperti kejujuran, disiplin, korupsi melalui tanggung jawab, dan penelitian yang pengembangan kerjasama. Kedua, model sama yaitu *HIDDEN* pengembangan Hidden metode kualitatif *CURICULUM* Kurikulum yang di MIN 1 digunakan adalah model di Banyumas. grass-roots. Ketiga, kegiatan yang mendukung penanaman sikap anti-korupsi meliputi inisiatif yang diprakarsai oleh guru, seperti perlombaan kebersihan kelas, penyediaan buku pengembangan diri, dan pemberian pin anti-korupsi.

F. Kerangka berpikir



Gambar 1 Gambar kerangka berpikir

Berdasarkan Gambar Kerangka berpikir di atas, Mata pelajaran PPKn memiliki peran dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang. Pertama penyelesaian kurikulum. Kedua menyediakan Rancangan Pembelajaran. Ketiga memulai proses pembelajaran serta penyisipan nilai-nilai.